

ANALISIS PENYEBAB PERMUKIMAN KUMUH PADA KELURAHAN KUTA GAMBIR KECAMATAN SIDIKALANG KABUPATEN DAIRI

Endi Martha Mulia¹⁾, Mayono Suko Marbinoto²⁾ dan Aprima Ndruru³⁾

¹⁾Jurusan Arsitektur, Institut Sains dan Teknologi TD.Pardede, Medan
Jl. DR. TD.Pardede No. 8, Medan 20153, Sumatera Utara, Indonesia

^{2),3)}Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut Sains dan Teknologi TD.Pardede, Medan
Jl. DR. TD.Pardede No. 8, Medan 20153, Sumatera Utara, Indonesia

Email : endimmulia@istp.ac.id,
mayonosuko@istp.ac.id
aprimanndruru@yahoo.com

Abstrak

Permukiman kumuh merupakan permukiman yang tidak layak huni karena bangunannya yang tidak teratur, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Permasalahan permukiman kumuh adalah tingkat sosial dan ekonomi masyarakat yang rendah serta penyediaan sarana dan prasarana di lingkungan permukiman kurang memadai, seperti pada kawasan permukiman di lingkungan Kelurahan Kuta Gambir, Kecamatan Sidikalang. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui kondisi tingkat sosial dan ekonomi masyarakat serta kondisi sarana dan prasarana. Hasil; temuan analisis yang di dapat yaitu, teridentifikasi kondisi kualitas permukiman atas dasar indikator: 33% Bangunan Tidak Memiliki Keteraturan, 2,25% Bangunan Tidak Memenuhi Persyaratan Teknis IMB, Kualitas Jalan Buruk pada 60% Luas Area, 84% jaringan drainase yang kondisinya buruk, SPAM tidak memadai terhadap 58% populasi, Pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis di 54%, pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis di 76%, Jalan lingkungan untuk mobil damkar tidak memadai di 100 %.

Kata kunci: Kondisi Tingkat Kekumuhan, sarana, prasarana, permukiman kumuh, Sosial, Ekonomi.

Abstract

Slums are uninhabitable settlements because of their irregular buildings, high level of building density, and unqualified quality of buildings and facilities and infrastructure. The problem of slums is the low social and economic level of the community and the provision of facilities and infrastructure in the residential environment is inadequate, such as in the residential area in the Kuta Gambir Village, Sidikalang District. The purpose of this study is to determine the conditions of the social and economic level of the community as well as the conditions of facilities and infrastructure. Results; The findings of the analysis obtained are, namely, the identification of the condition of the quality of settlements on the basis of indicators: 33% of Buildings Do Not Have Regularity, 2.25% of Buildings Do Not Meet IMB Technical Requirements, Poor Road Quality in 60% Area Area, 84% drainage networks whose conditions are rushed, SPAM is inadequate against 58% population, Wastewater management

does not meet technical requirements at 54%, waste management does not meet technical requirements at 76%, Environmental roads for damkar cars are inadequate at 100%.

Keywords: *Slum Level Conditions, facilities, infrastructure, slums, Social, Economic.*

1. Pendahuluan

Latar Belakang

Pembangunan permukiman merupakan upaya untuk memenuhi salah satu kebutuhan dasar manusia, sekaligus untuk meningkatkan mutu lingkungan kehidupan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Permasalahan yang di hadapi sesungguhnya tidak terlepas dari aspek yang berkembang dalam dinamika kehidupan masyarakat maupun kebijakan pemerintah dalam mengelola persoalan yang ada.judul dari setiap pembahasan menggunakan.

Pentingnya penanganan permasalahan lingkungan salah satunya adalah penanganan permukiman kumuh ini, sejalan dengan apa yang ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman bahwa penataan perumahan dan permukiman bertujuan untuk (1) Memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia, dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan manusia; (2) Mewujudkan perumahan dan permukiman yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman serasi dan teratur.

Penanganan permukiman kumuh tidak bisa hanya oleh satu-dua sektor atau menjadi beban utuh dari pemerintah, disinilah perlu minat dan kehendak dari seluruh insan yang terpanggil baik karena jabatan dan tanggung jawabnya, para cerdik cendekia, juga para penentu kebijakan, para pengusaha di sektor swasta dan bahkan mereka yang berada dalam masalah tersebut yaitu masyarakat yang tinggal dalam lingkungan permukiman kumuh; untuk menggalang suatu keterpaduan dan berbagi peran serta berkoordinasi dengan mantap untuk mendapatkan solusi penanganan permukiman kumuh tanpa melukai hati masyarakat, tidak juga membiarkan terjadinya pelanggaran hukum, ataupun tidak merugikan pihak-pihak tertentu. Perlu kerja keras dari semua pihak untuk mewujudkan 0% kawasan kumuh.

Kecamatan sidikalang merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Kabupaten Dairi ini secara Geografis berada di barat laut Provinsi Sumatera Utara dengan luas daerah sekitar 191.625 Ha atau sekitar 2,67% dari luas keseluruhan provinsi Sumatera Utara (71.680.000 Ha). Kabupaten Dairi secara administratif terdiri dari 15 kecamatan, dengan 145 kelurahan. Jika ditinjau dari aspek Topografis Kecamatan Sidikalang yang berada di ketinggian 1.066 m dpl tersebut terdiri dari gunung-

gunung dan bukit-bukit dengan kemiringan yang bervariasi. Sidikalang yang merupakan salah satu kecamatan, dan sekaligus sebagai ibukota kecamatan dan ibukota kabupaten, terdiri dari 11 kelurahan, yaitu: Kelurahan Sidiangkat, Kelurahan Batang Beruh, Kelurahan Bintang Hulu, Kelurahan Kalang Simbara, Kelurahan Bintang, Kelurahan Kalang, Kelurahan Kota Sidikalang, Kelurahan Belang Malum, Kelurahan Kuta Gambir, Kelurahan Huta Rakjat, dan Kelurahan Bintang Mersada.

Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Dairi, telah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan pembangunan perumahan dan permukiman salah satunya telah dilakukan kegiatan (Identifikasi dan Pemutakhiran data Permukiman kumuh di tahun 2020) di Kabupaten Dairi. Maka Kabupaten Dairi teridentifikasi memiliki 50 kelurahan kawasan permukiman kumuh yang tersebar di 15 kecamatan yang ada di Kabupaten Dairi, dan salah satunya kecamatan Sidikalang, Kelurahan Kuta Gambir, dengan luas 160 hektar.

Permasalahan lingkungan permukiman yang di kategorikan tidak sehat, penyebab utamanya sama seperti di kota-kota kecil lainnya di Indonesia dengan ciri-ciri sebagai berikut :

1. Dihuni oleh penduduk yang padat, baik karena pertumbuhan penduduk akibat kelahiran maupun karena adanya urbanisasi.
2. Dihuni oleh warga yang berpenghasilan rendah dan tidak tetap, atau memproduksi subsistem yang hidup di bawah garis kemiskinan.
3. Kondisi kesehatan dan sanitasi yang rendah, biasanya ditandai oleh lingkungan fisik yang jorok dan mudahnya tersebar penyakit menular.
4. Langkanya pelayanan kota seperti air bersih, fasilitas MCK, listrik, dan sebagainya.
5. Pertumbuhannya yang tidak terencana sehingga penampilan fisiknya pun tidak teratur dan tidak terurus; jalan yang sempit, halaman tidak ada, dan sebagainya.
6. Kuatnya gaya hidup “pedesaan” yang masih tradisional.

7. Secara social terisolasi dari pemukiman lapisan masyarakat lainnya.
8. Ditempati secara illegal atau status hukum tanah yang tidak jelas (bermasalah).
9. Biasanya ditandai oleh banyaknya perilaku menyimpang dan tindak kriminal.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana tingkat kekumuhan permukiman di Kelurahan Kuta Gambir, Kecamatan Sidikalang ?
2. Apakah penyebab permukiman kumuh di Kelurahan Kuta Gambir, Kecamatan Sidikalang ?

Manfaat dan Tujuan

1. Untuk Mengetahui tingkat kekumuhan permukiman di Kelurahan Kuta Gambir, Kecamatan Sidikalang.
2. Untuk mengetahui penyebab permukiman kumuh di Kelurahan Kuta Gambir, Kecamatan Sidikalang.

Manfaat Penelitian

1. Sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya untuk mengkaji hal-hal yang tentunya berkaitan dengan permukiman kumuh.
2. Sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi pemerintah Kabupaten Dairi dalam menentukan kebijakan pengembangan / penataan permukiman kumuh Kelurahan Kuta Gambir, Kecamatan Sidikalang.

Ruang Lingkup Pembahasan

1. Ruang Lingkup Materi
Ruang lingkup materi dari penelitian ini yakni mengenai identifikasi kawasan kumuh yang dibatasi pada bentuk pemetaan kawasan kumuh Kelurahan Kuta Gambir, Kecamatan Sidikalang dengan fokus kajian pada aspek kriteria kawasan kumuh disertai beberapa analisis pendukung untuk penetapan kawasan kumuh seperti analisis fisik kawasan, kondisi sarana dan prasarana serta konsep penanganan kawasan kumuh.
2. Ruang Lingkup Wilayah
Lingkup wilayah yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu Kelurahan Kuta Gambir, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi.

Sistematika Pembahasan

Sub bahasan ini akan memberikan penjelasan mengenai isi dari laporan secara singkat dan dapat

memberikan gambaran secara keseluruhan mengenai isi dari laporan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Permukiman

Pengertian dasar permukiman dalam Undang-Undang No.1 tahun 2011 adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain dikawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian atau wilayah survey yang dilakukan berlokasi di Permukiman di Kelurahan Kuta Gambir, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi. Pemilihan lokasi survey dikarenakan Kelurahan Kuta Gambir merupakan salah satu kelurahan yang tergolong kumuh di Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi.

Jenis dan Sumber Data

Hal yang penting dalam persiapan penelitian lapangan adalah dengan penyusunan kebutuhan data dan informasi. Dalam penelitian ini menjelaskan jenis data dan sumber data.

Jenis Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi data kualitatif dan data kuantitatif yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Data kualitatif yaitu data yang berbentuk bukan angka atau menjelaskan secara deskriptif tentang lokasi penelitian secara umum.
2. Data kuantitatif yaitu data yang menjelaskan kondisi lokasi penelitian dengan tabulasi angka yang dapat dikalkulasikan untuk mengetahui nilai yang diinginkan.

Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan, digolongkan ke dalam dua kelompok, yaitu data primer dan data sekunder. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat uraian berikut ini :

1. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil observasi lapangan seperti data yang diperoleh dari responden melalui observasi langsung di lapangan. Observasi ini dilakukan untuk mengetahui kondisi kualitatif obyek studi. Jenis data yang dimaksud meliputi :
 1. Pengamatan langsung berupa kondisi bangunan, kondisi jalan lingkungan, kondisi

drainase lingkungan, kondisi penyediaan air minum, kondisi pengelolaan air limbah, kondisi pengelolaan persampahan, kondisi pengamanan kebakaran, potensi sosial ekonomi, komitmen pemda.

2. Wawancara mengenai administrasi bangunan (IMB), status tanah dan dukungan masyarakat.
2. Sumber sekunder merupakan sumber data yang berasal dari instansi yang terkait dengan studi untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan untuk kegiatan analisis. Selain itu, data sekunder lainnya adalah studi literatur untuk mendapatkan literatur yang berkaitan dengan studi. Data sekunder yang dibutuhkan antara lain:
 1. RTRW Kabupaten Dairi diperoleh dari Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Dairi
 2. Status tanah dan IMB diperoleh dari Dinas Pertanahan
 3. Kondisi pengelolaan air limbah diperoleh UPTD pengelolaan air limbah
 4. Data Demografi diperoleh dari Kantor Kelurahan Kuta Gambir
 5. Kondisi Fisik Dasar dari Kantor Kelurahan Kuta Gambir
 6. Kondisi sosial ekonomi masyarakat dari Kantor Kelurahan Kuta Gambir

7. Kondisi pengamanan kebakaran diperoleh dari Dinas BPBD Kabupaten Dairi.

Variabel dan Indikator

1. Variabel penelitian merupakan sesuatu hal yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi mengenai hal tersebut kemudin ditarik suatu kesimpulan. Dengan kata lain, variabel penelitian adalah hal-hal yang akan kita teliti.
2. Indikator adalah sebuah alat yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau status dan memungkinkan dilakukannya pengukuran terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu. Sebuah indikator tidak selalu menggambarkan keadaan secara keseluruhan tetapi seringkali hanya memberi petunjuk tentang keadaan keseluruhan tersebut.
3. Adapun variabel dan indikator yang digunakan dalam penelitian mengenai identifikasi kawasan kumuh di Kelurahan Kuta Gambir dapat dilihat pada tabel III.1

Tabel III.1 Variabel dan Indikator Penyebab Peremukiman Kumuh

NO	Variabel	Indikator	Sub Indikator	Sumber
1	Vitalitas Non Ekonomi	1.1 Kondisi Fisik Bangunan 1.2 Kependudukan	1.2.1 Kepadatan Bangunan 1.2.2 Bangunan Temporer 1.2.3 Tapak Bangunan 1.2.4 Jarak Antar Bangunan 1.2.1 Tingkat Kepadatan Penduduk 1.2.2 Tingkat Pertumbuhan Penduduk	Survey Lapangan Survey Lapangan Survey Lapangan Survey Lapangan BPS Kabupaten Dairi BPS Kabupaten Dairi
2	Vitalitas Ekonomi	2.1 Letak Strategis Kawasan 2.2 Jarak Ketempat Mata Pencarian		Survey Lapangan Wawancara

		2.3 Fungsi Sekitar Kawasan		
3	Status Tanah	3.1 Kriteria Status Tanah 3.2 Status Kepemilikan Tanah		Survey Lapangan Kepala Desa Atau Lurah Setempat
4	Kondisi Sarana dan Prasarana	4.1 Kondisi Jalan 4.2 Kondisi Drainase 4.3 Kondisi Air Bersih 4.4 Kondisi Air Limbah 4.5 Kondisi Persampahan		Survey Lapangan Survey Lapangan Survey Lapangan Survey Lapangan Survey Lapangan
5	Komitmen Pemerintah	5.1 Indikasi Keinginan	5.1.1 Pembiayaan 5.1.2 Kelembagaan	Survey Lapangan Wawancara
6	Prioritas Penanganan	6.1 Dekat Ke Kawasan Pusat Kota Metropolitan 6.2 Dekat ke Kawasan Pusat Pertumbuhan Kota Metropolitan 6.3 Dekat Ke Ibukota Kota/Kabupaten Bersangkutan		Survey Lapangan Survey Lapangan Survey Lapangan

Sumber : Hasil Olahan Penulis, Tahun 2021

Teknik Analisis Data

Adapun metode analisis yang digunakan untuk menjawab permasalahan dan sesuai dengan rumusan masalah, maka ada beberapa alat analisis yang digunakan, yaitu

Analisis Kuantitatif

Yang termasuk dalam analisis kuantitatif dalam penyusunan laporan ini yaitu analisis Identifikasi Kawasan Kumuh Kelurahan Kuta Gambir dan penentuan tingkat prioritas penanganan.

Analisis Tingkat Kekumuhan

Untuk menghitung nilai tingkat kekumuhan digunakan rumus sebagai berikut (Dirjen Perumahan dan Permukiman) :

1. Penilaian Tingkat Kekumuhan
 1. Kondisi Bangunan.
 - a. Kepadatan Bangunan
 - b. Persyaratan Teknis
 2. Kondisi Jalan Lingkungan. Cakupan Layanan
 - a. Cakupan Layanan
 - b. Kualitas Jalan
 3. Kondisi Drainase Lingkungan.
 - a. Persyaratan Teknis
 - b. Cakupan Pelayanan
 4. Kondisi Penyediaan Air Minum.

- a. Persyaratan Teknis
- b. Cakupan Pelayanan
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah.
 - a. Persyaratan Teknis
 - b. Cakupan Layanan
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan.
 - a. Persyaratan Teknis
 - b. Cakupan Pelayanan
7. Kondisi Pengamanan Kebakaran.
 - a. Persyaratan Teknis
 - b. Cakupan Pelayanan
8. Nilai Strategis Lokasi.
9. Kepadatan Penduduk Untuk Kota Metro & Kota Besar
10. Potensial Sosial Ekonomi.
11. Dukungan Masyarakat.
12. Komitmen Pemda.
13. Status Tanah
14. Kesesuaian RTR
15. Persyaratan Administrasi Bangunan.

4. GAMBARAN UMUM DAN ANALISI

1. Gambaran Umum Kecamatan Sidikalang Letak Geografis

Sidikalang adalah Kecamatan dan juga menjadi Ibukota dari Kabupaten Dairi, salah satu kabupaten di provinsi Sumatera Utara-Indonesia. Kecamatan Sidikalang terdiri dari 11 Kelurahan, 41 lingkungan dan 34 dusun dengan luas Kecamatan

70,67 km² atau 4,02% dari total luas Kabupaten Dairi yang memanjang dari arah Utara ke Tenggara. Dengan batas - batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kecamatan Siempat Nempu
Sebelah Selatan : kecamatan Kerajaan
Sebelah Barat : Kecamatan Berampu
Sebelah Timur : Kecamatan Sitinjo

2. Tinjauan Umum Kelurahan Kuta Gambir

Letak Geografis

Kelurahan Kuta Gambir merupakan salah satu kelurahan yang terdapat di kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi Propinsi Sumatera Utara dengan luas wilayah 260 Ha. Secara administratif Kelurahan Kuta Gambir terdiri atas 7 Lingkungan. Adapun batas-batas Kelurahan Kuta Gambir adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kelurahan Kuta Rakyat dan Kota Sidikalang
Sebelah Selatan : Kelurahan Lae Sembelin
Sebelah Barat : Kelurahan Karing
Sebelah Timur : Kelurahan Belang Malum

Hasil Evaluasi Pembahasan Wilayah Studi Lingkungan Kuta Gambir

Tingkat Kekumuhan Kawasan Permukiman Kumuh Di Lingkungan Kuta Gambir

Kuta Gambir meliputi 3 (tiga) variabel yaitu penilai kekumuhan secara fisik, penilaian pertimbangan lain (Non Fisik) dan penilaian legalitas lahan. Penilaian kekumuhan secara fisik terdiri dari 7 indikator yaitu kondisi bangunan, kondisi jalan lingkungan, kondisi drainase lingkungan, kondisi penyediaan air minum, kondisi pengelolaan air limbah, kondisi pengelolaan persampahan dan kondisi pengamanan kebakaran selanjutnya penilaian pertimbangan lain terdiri dari 5 indikator yaitu nilai strategis lokasi, kepadatan penduduk, potensi sosila ekonomi, dukungan masyarakat, komitmen pemerintah daerah dan penilaian legalitas lahan terdiri dari 3 indikator yaitu status tanah, kesesuaian RTR kemudian persyaratan administrasi bangunan (IMB).

A. Penilaian kekumuhan secara fisik

a. Kondisi Bangunan

1. Keteraturan Bangunan

Sebagian besar bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan, dalam hal dimensi, orientasi, dan bentuk tapak. 33 % Bangunan Tidak Memiliki Keteraturan (Nilai Bobot 1)

2. Kepadatan Bangunan

Kepadatan Bangunan Sebesar 59 Unit/Ha

(Nilai Bobot 1)

3. Persyaratan Teknis

2,25 % Bangunan Tidak Memenuhi Persyaratan Teknis IMB (Nilai Bobot 1)

b. Kondisi Jalan Lingkungan

1. Cakupan Layanan

Cakupan Layanan Jalan Lingkungan Tidak Memadai Di 50 % Luas Area (Nilai Bobot 1).

2. Kualitas Jalan

Kualitas Jalan Buruk pada 60 % Luas Area (Nilai Bobot3).

c. Kondisi Drainase Lingkungan

1. Cakupan Pelayanan 98 % jaringan drainase sudah memadai terhadap Lingkungan Kuta Gambir. (nilai bobot 5).

2. Kualitas Drainase 84 % jaringan drainase yang kondisinya buruk dan belum terlayani terhadap luas area di kawasan penelitian. (Nilai Bobot 5).

d. Kondisi Penyediaan Air Minum

1. Persyaratan Teknis

SPAM Tidak Memenuhi Persyaratan Teknis di 30% Luas Area (Nilai Bobot 1).

2. Cakupan Pelayanan

Cakupan pelayanan SPAM tidak memadai terhadap 58 % populasi (Nilai Bobot 3)

e. Kondisi Pengelolaan Air Limbah

1. Persyaratan Teknis

2. Cakupan Layanan

3. Persyaratan Teknis

pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis di 76%-100% luas area. Cakupan Pelayanan. (Nilai Bobot 3).

4. Cakupan Pelayanan

Cakupan pengelolaan persampahan tidak memadai terhadap 90 % populasi (Nilai Bobot 5).

f. Kondisi Pengamanan Kebakaran

1. Persyaratan Teknis

Pasokan Air Damkar Tidak Memadai Di 43,91 % Luas Area (Nilai Bobot 1).

2. Cakupan Pelayanan

Jalan lingkungan untuk mobil damkar tidak memadai di 100 % luas area (Nilai Bobot 5).

B. Penilaian Pertimbangan Lain

a. Nilai Strategis Lokasi

Lokasi terletak pada fungsi strategis

kawasan/wilayah, artinya keberadaan lokasi mendukung fungsi tertentu dalam konstelasi kawasan/wilayah. Lokasi terletak pada fungsi strategis kawasan/wilayah (Nilai Bobot 5).

b. Kepadatan penduduk

Lokasi memiliki kepadatan penduduk yang tinggi, artinya jumlah penduduk per hektar pada lokasi relatif tinggi sesuai. Kepadatan penduduk pada lokasi sebesar 641 jiwa/Ha (Nilai Bobot 5).

c. Potensi Sosial Ekonomi

Lokasi memiliki potensi sosial

ekonomi tinggi yang potensial dikembangkan, artinya pada lokasi terdapat potensi kegiatan ekonomi seperti pengolahan hasil laut dan perdagangan. Lokasi memiliki potensi sosial ekonomi tinggi yang potensial dikembangkan (Nilai Bobot 5).

d. Dukungan Masyarakat

e. Komitmen Pemerintah Daerah

C. **Penilaian Legalitas Lahan**

a. Aspek Status Lahan

b. Kesesuaian RTR

c. Persyaratan Administrasi Bangunan

pertimbangan lain dengan nilai 25 dan legalitas lahan adalah (+1) .

Konsep Penataan Kawasan Permukiman Kumuh

Berdasarkan tabel IV.3 model penataan kawasan permukiman kumuh adalah model peremajaan . Model peremajaan terpilih sebagai alternatif berdasarkan pertimbangan tiga aspek yaitu kekumuhan, pertimbangan lain dan legalitas lahan.

sekali melakukan perbaikan untuk drainase yang mengalami kerusakan ringan hingga sedang. Perbaikan saluran drainase juga diperlukan untuk saluran drainase yang mengalami kerusakan.

2. Masyarakat harus ikut serta menciptakan lingkungan yang bersih tanpa sampah dengan membuat tempat pembuangan sampah (TPS) dengan memilah jenis sampah sehingga mempermudah pengelolaan persampahan, selain itu pemerintah juga harus berperang aktif dengan meningkatkan kinerja pengangkutan sampah, sehingga tidak terjadinya penumpukan sampah di lingkungan permukiman.

DAFTAR PUSTAKA

Alan Gilbert, (1996). "Urbanisasi dan Kemiskinan, (PT, Tiara Wacana Yogya :

Yogyakarta). Hlm 158

Betrand (1987), dalam Darsono. W (2005). "Masyarakat dalam perubahan budaya dan akumulasi budaya", Permukiman Kumuh.

Charter, A. (1984). "Penataan Permukiman Kumuh Rawan Bencana Kebakaran Di Kelurahan Lingkas Ujung Kota Tarakan", Jurnal Tata Kota dan Daerah Vol. 4, No. 2, Desember.

Melalui identifikasi permasalahan kekumuhan, maka akan diperoleh basis data kondisi kualitas bangunan dan infrastruktur keciptakaryaan yang diindikasikan termasuk dalam kategori kumuh dengan klasifikasi kekumuhannya di wilayah studi kawasan permukiman kumuh. Berdasarkan hasil analisis tabel penilaian di kawasan permukiman kumuh pada wilayah studi bahwa tingkat kekumuhannya adalah kumuh Sedang dengan bobot penilaian tingkat kekumuhan 39,

5. PENUTUP

Kesimpulan

Dari hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Tingkat kekumuhan di wilayah studi adalah kumuh sedang yang penyebab utama kekumuhan yaitu kondisi kualitas drainase yang tidak mampu menampung aliran air limbah dari rumah warga. Sebagian besar drainase yang ada rusak berat hingga sedang. Hal ini juga menyebabkan terjadinya genangan air di sebagian besar wilayah dengan drainase rusak tersebut.

2. Berdasarkan beberapa pertimbangan termasuk tingkat kekumuhan, pertimbangan lain dan legalitas lahan maka konsep penataan yang diterapkan pada wilayah studi adalah peremajaan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Masyarakat dapat melakukan swadaya yang terlibat langsung dalam perawatan dan perbaikan kecil terhadap saluran drainase. Selain itu perlu adanya perhatian dari pemerintah setempat untuk melakukan pemeliharaan sejumlah drainase yang masih berfungsi dengan baik

- Daldjoeni. (1987). "Analisis Prospektif Partisipatif Dalam Pengelolaan Wilayah". Forum Pascasarjana, Vol.34 No.4 Oktober.
- Darsono. W, (2004), "PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN", Blog Syahriartato's. <http://syahriartato.wordpress.com/2013/10/02/permukiman-kumuh-perkotaan/> (5 Agustus 2).
- Doxiadis, Constantinos. (1968), An Introduction To The Science Of Human Settlements- Ekistics, London: Hutchinson of London.
- Direktorat Pengembangan Permukiman Departemen Pekerjaan Umum (2006) pendoman indentifikasi kawasan permukiman kumuh daerah penyangga kota metropolitan (<http://ciptakarya.pu.go.id>). Diakses 07 april 2015
- Draft Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Tentang Pedoman Teknik Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- Firman Tommy, (1996). Tesis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terciptanya Kawasan Permukiman Kumuh di Kawasan Pusat Kota (Studi Kasus: Kawasan
- Pancuran, Salatiga), Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro.
- Lee Lisna Yoeliani P (1966) , " Faktor Penyebab Tumbuhnya Permukiman Kumuh di Pusat Kota dan Kawasan Pesisir".
- Odexyundo, "pengertian permukiman", blog odexyundo. <https://syarartato.blogspot.com/2009/08/permukiman-kumuh-perkotaan>.
- Raharjo, (2005). "Dampak Urbanisasi Terhadap Pemukiman Kumuh (Slum Area) Di Daerah Perkotaan", JUPIIS Vol. 5, No. 2, Desember.
- Silas. J (1996), dalam Syaiful. A (2002). " Kampung Menuju Metropolitan", Permukiman Marjinal amat Liar.
- Sul Yadi Wardi ST.MT (1997). "ciri-ciri permukiman kumuh" penerbit: Alfabeta
- Undang-undang no.1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman
- <https://perpustakaan.bps.go.id>
- <https://romantik.bps.go.id>
- <https://sippa.ciptakarya.pu.go.id>